

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang memiliki tujuan dalam memodernisasi postur pertahanan Indonesia yang dilakukan melalui program pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum atau, *Minimum Essential Force* (MEF). Program tersebut mulai dirancang sejak tahun 2007 dan kemudian dilaksanakan pada tahun 2009, dengan membagi tahapan program menjadi tiga tahap yang masing-masing tahapannya berdurasi lima tahun, seperti tahap pertama 2010-2014, tahap kedua 2015-2019, tahap ketiga 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki target persentase pencapaian tersendiri khususnya terkait Alat Utama Sistem Senjata, atau biasa disebut dengan alutsista, seperti MEF I sebesar 57,24% dan MEF II sebesar 75,54%. Target pemenuhan 100% diharapkan rampung pada tahun 2024, tepat pada akhir tahap ketiga MEF.¹

Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama, MEF merupakan sebuah program pencapaian standar kekuatan pokok minimum yang ditujukan untuk komponen utama sistem pertahanan negara, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), guna memperoleh postur pertahanan negara yang ideal.² Program tersebut disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. Terdapat sebanyak tiga matra, atau cabang militer komponen utama yang diprioritaskan, yakni TNI Angkatan Udara (TNI-AU), TNI

¹ Ervita L. Zahara & Arjun Rizky M.N. (2020). Anggaran Pertahanan Indonesia Pemenuhan Minimum Essential Force. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-28.pdf>, p. 4.

² Kemhan RI. (2012). Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>, p. 4.

Angkatan Laut (TNI-AL), dan TNI Angkatan Darat (TNI-AD), yang mana ketiga cabang militer ini diharapkan dapat melaksanakan tugas pokoknya di seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang cukup strategis di kawasan Asia-Pasifik, tepatnya di Asia Tenggara, masih terbuka terhadap potensi ancaman-ancaman keamanan yang berpotensi merusak stabilitas kawasan beserta Indonesia seperti terorisme, separatisme, perompakan, penangkapan ikan ilegal, sengketa wilayah negara, dan lain sebagainya. Selain itu potensi ancaman non-militer, seperti bencana alam juga merupakan bagian dari ancaman terhadap Indonesia.

Ancaman-ancaman yang bermasalah tersebut telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menjawab dengan lebih meningkatkan kapabilitas pertahanannya ke standar kekuatan yang lebih esensial, agar dapat tercipta keamanan negara yang lebih kuat dan siap untuk mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut. Melihat postur pertahanan Indonesia di sepanjang abad ke-21 ini, menjadikan revolusi terhadap segala aspek yang terkandung dalam pertahanan sebagai opsi terbaik untuk pemerintah Indonesia lakukan melalui pemenuhan program MEF, baik dari segi perlengkapan, teknologi, edukasi, SDM (Sumber Daya Manusia), industri militer nasional, dan lain-lainnya.

Perencanaan MEF tersebut dijalankan melalui kebijakan bersama, atau *collegial policy* yang disetujui secara bersama oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), dan TNI, bahwa MEF merupakan pembangunan kekuatan pertahanan militer terdiri atas alutsista, sarana dan prasarana, organisasi, dan SDM.³ Namun perlu diingat, bahwa MEF sejatinya merupakan sebuah strategi pembangunan kekuatan komponen utama yang ditujukan

³ *Ibid.*, p. 8.

ke arah yang ideal, dan MEF juga tidak diarahkan kepada perlombaan persenjataan/*arms race* maupun pembangunan kekuatan yang ditujukan untuk memenangkan perang total, akan tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok dengan standar tertentu yang memiliki efek tangkal.⁴

Pemenuhan MEF diimplementasikan melalui elemen rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan, yang kemudian hasil dari elemen pembangunan tersebut difokuskan kepada titik permasalahan potensi ancaman di Indonesia yang dapat disebut dengan *flash point*. Dalam MEF, menurut Kemhan RI, rematerialisasi ditujukan untuk pemenuhan TOP (Tabel Organisasi dan Peralatan) dan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan) TNI ke 100%. Kemudian revitalisasi, dimaksudkan sebagai peningkatan satuan atau materiil ke tingkat yang lebih tinggi, agar sesuai dengan tingkat ancaman di suatu wilayah. Untuk relokasi, ditujukan untuk pengalihan atau pemindahan satuan ke wilayah Indonesia yang berpotensi memiliki ancaman tinggi. Dan untuk pengadaan, dapat diartikan sebagai pembangunan terhadap satuan baru personel atau alutsista/materiil.⁵ Pelaksanaan empat strategi tersebut dilakukan dengan tujuan pencapaian aspek-aspek utama, seperti alutsista, pemeliharaan dan perawatan, serta organisasi dan sarana prasarana, yang juga selain itu didukung oleh aspek-aspek lainnya yang meliputi: industri pertahanan, profesionalisme, serta kesejahteraan prajurit.⁶

Dalam proses pencapaian MEF ini, melakukan pengadaan alutsista yang lebih maju dan sesuai untuk mencapai pemenuhan target MEF tentu menjadi salah satu fokus utama yang vital dan harus dipenuhi, mengingat target di setiap tahapan MEF harus dicapai dengan anggaran dan waktu yang terbatas. Perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia juga menginginkan pengadaan alutsista yang dibuat secara mandiri dari dalam negeri dan dapat mencukupi standar MEF dengan menyesuaikan anggaran pertahanan yang terus meningkat tiap tahunnya.

⁴ *Ibid.*, p. 4-5.

⁵ *Ibid.*, p. 6.

⁶ Kemhan RI. (2019). Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Nir Militer Multidimensional di Era Milenial. Jakarta: Biro Humas Setjen Kemhan., p. 12.

Akan tetapi hal tersebut juga masih menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia, mengingat masih minimnya anggaran atau sumber daya guna investasi terhadap infrastruktur serta ilmu yang terbatas untuk industri pertahanan dalam negeri. Industri pertahanan juga masih belum dapat memenuhi permintaan yang sesuai dari pemerintah Indonesia, karena tidak menerapkan teknologi yang lebih modern atau canggih.⁷ Hal tersebut tentu membuat pemerintah Indonesia mempertimbangkan pemenuhan MEF-nya dengan beralih kepada industri pertahanan dari luar negeri yang lebih maju dan dapat mencukupi kebutuhan pertahanan Indonesia yang belum bisa dicukupi oleh industri pertahanan dalam negeri. Dari sinilah kerja sama antar-negara menjadi salah satu cara mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di dalam bidang pertahanannya.

Dengan demikian, diplomasi pertahanan menjadi instrumen yang sesuai untuk kepentingan Kementerian Pertahanan dalam memenuhi target pengadaan alutsista dalam standar MEF. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, dan negara-negara lainnya telah menjadi sasaran pemerintah Indonesia untuk dijadikan mitra bilateral dalam pengembangan atau pengadaan peralatan-peralatan pertahanan untuk kepentingan pertahanan negaranya.

Terdapat beberapa contoh negara, seperti Korea Selatan yang bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun kapal selam, yang mana salah satu dari tiga kapal yang dipesan dibangun di PT. PAL, Surabaya.⁸ Lalu terdapat negara seperti Belanda, yang melakukan pengembangan kerja sama dengan Indonesia juga dalam bidang pembuatan sejumlah jenis kapal perang, salah satunya yakni dua fregat kelas Raden Eddy Martadinata, bernama KRI R.E. Martadinata (331) dan KRI I Gusti Ngurah Rai (332).⁹ Namun ada pula sebuah negara yang

⁷ Ervita L. Zahara & Arjun Rizky M.N, *Op. Cit.*, p. 5.

⁸ Faris Al-Fadhat & Naufal Nur Aziz Effendi. (2019). Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: Kedaulatan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 373-392., p. 375.

⁹ Rendy Filovia, Andy Alfatih, & Muhammad Yusuf Abror (2021). Efektivitas Diplomasi Indonesia [Studi: Kerjasama Bilateral Indonesia-Belanda Dalam Mencapai Kepentingan Pertahanan Indonesia]. (Doctoral dissertation, Sriwijaya University), p. 31.

telah memiliki berbagai macam bentuk kerja sama dengan Indonesia yang terbilang cukup erat terutama dalam bidang pertahanan, yakni Amerika Serikat.

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu mitra strategis Indonesia yang telah memiliki sejarah cukup lama dalam menjalin hubungan diplomatik, serta kerja sama bilateral yang kuat selama lebih dari 70 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, AS telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hubungan kerja sama antara kedua negara tersebut di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pertahanan, yang mana berbagai pengadaan alutsista telah dijalankan dalam kerja sama tersebut. Memasuki era reformasi di abad ke-21, setelah melalui berbagai macam peristiwa dan dinamika yang berpengaruh pada hubungan kedua negara tersebut mulai dari orde lama hingga orde baru, keamanan Indonesia sekali lagi masih dihadapkan oleh banyak potensi ancaman.

Melihat sistem pemerintahan mulai berubah ke sistem yang lebih demokratis sejak turunnya Presiden kedua Indonesia yakni Suharto, pemerintah AS mengambil pertimbangan untuk melonggarkan sanksi embargonya pada tahun 2005 yang disebabkan oleh pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dari militer Indonesia di Timor Timur, dan mulai membuka kembali hubungan kerja sama penuh, terutama di bidang pertahanan pada tahun 2006.

Sejak AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia secara penuh pada tahun 2006, peningkatan kerja sama antara Indonesia dan AS terlihat selalu meningkat, yang mana dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari segi jumlah kegiatan, ruang lingkup kerja sama, maupun tingkat keterlibatan. Sebagai contoh, telah terdapat setidaknya sebanyak 998 kerja sama gabungan pertahanan dan keamanan oleh kedua negara tersebut, yang mana telah dijalankan oleh pejabat militer resmi dari Indonesia dan AS di sepanjang tahun 2011-2016.¹⁰

¹⁰ Kemlu RI. (n.d.). Indonesia-US Bilateral Relations. Retrieved from https://kemlu.go.id/washington/en/pages/hubungan_bilateral/554/etc-menu

Pada tahun 2010, kedua negara tersebut membawa hubungan kerja samanya ke tingkat yang lebih tinggi, dengan melakukan perjanjian terkait kerja sama pertahanan yang komprehensif. Perjanjian Indonesia dan AS terkait kerja sama tersebut dalam bidang pertahanan ditandatangani pada 2010, yang mana selanjutnya disempurnakan dengan melakukan sebuah *joint statement* pada 26, Oktober 2015.¹¹

Dalam menjalankan kepentingan pemenuhan peralatan-peralatan pertahanannya di dalam program MEF ini, pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama dengan AS melalui program-program pengadaan persenjataan yang dikelola oleh *Defense Security Cooperation Agency* (DSCA) di bawah Departemen Pertahanan AS (DoD), yang mana program-program tersebut meliputi *Foreign Military Sales* (FMS) dan *Excess Defense Articles* (EDA).

Berbeda dengan *Direct Commercial Sales* (DCS) yang mana kontrak pengadaannya dilakukan oleh suatu negara langsung dengan perusahaan persenjataan, FMS dilakukan melalui skema yang berbeda. Di bawah program pengadaan *government-to-government* (G2G) ini, suatu negara dapat mengajukan permintaan pengadaan berupa pelatihan, jasa militer, dan tentunya beserta barang melalui pengadaan yang baru, atau stok yang dimiliki oleh Dephan AS.¹² Pertama, suatu negara akan menunjukkan ketertarikan kepada peralatan pertahanan yang diminati melalui *Letter of Request* (LOR). Setelah ditinjau, selanjutnya penjualan akan disetujui oleh pemerintah AS, dan apabila diperlukan akan disetujui juga oleh Kongres AS. Setelah melalui tahap tersebut, DSCA akan mengeluarkan sebuah *Letter of Offer and Acceptance* (LOA) yang berisi penjelasan atau rincian terkait artikel pertahanan, pelatihan,

¹¹ Kemhan RI. (2015) Defence White Paper. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-ENGLISH-VERSION.pdf>

¹² DASA (DE&C). (n.d.). Security Assistance. Retrieved from <https://www.dasadec.army.mil/Security-Assistance/>

serta dukungan-dukungan yang ditawarkan, dan seluruh informasi pengadaan tersebut akan diunggah ke dalam situs resmi DSCA setelah Kongres AS mendapatkan pemberitahuan.¹³

Selain itu terdapat juga program pengadaan yang lainnya yakni EDA, di mana program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan artikel pertahanan AS kepada negara-negara yang dianggap sebagai mitra oleh pemerintah AS.¹⁴ Hal tersebut karena pemerintah AS seringkali mendapati angka peralatan-peralatan pertahanan yang dimiliki oleh militernya “berlebihan”. Untuk mengatasi hal tersebut, program EDA dapat memberikan peralatan-peralatan pertahanan yang dianggap oleh militer AS sebagai “berlebihan”, kepada negara-negara mitra AS melalui penjualan dengan harga murah, atau bisa dengan pemberian sebagai hibah. Namun terlepas dari artikel pertahanan itu sendiri, negara mitra akan diminta untuk membayar hal-hal teknis lainnya, yakni *packing, crating, handling, and transportation* (PCH&T), juga perbaikan terhadap peralatan pertahanan tersebut apabila diperlukan. Oleh karena itu EDA biasa dikenal sebagai “as is, where is”, atau sebagaimana adanya.¹⁵

Sepanjang MEF II tahun 2015-2019, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk kerja sama Indonesia-Amerika Serikat di atas, berkontribusi terhadap pencapaian alutsista dalam program MEF tahap II. Dalam MEF tersebut, pemerintah Indonesia telah menerima sejumlah peralatan-peralatan pertahanan melalui forum atau program-program yang berkaitan dengan pembelian atau perolehan alutsista seperti FMS dan EDA. Peralatan-peralatan yang diperoleh juga berasal dari produksi perusahaan-perusahaan pertahanan seperti Lockheed-Martin, Boeing, Raytheon, dan lain-lainnya. Dampak dari berbagai bentuk kerja sama tersebut

¹³ US DoS. (2021). U.S. Arms Sales and Defense Trade. Retrieved from <https://www.state.gov/u-s-arms-sales-and-defense-trade/>

¹⁴ Marcus Mackey. (2019). Cleaning out the garage. Retrieved from https://www.army.mil/article/226448/cleaning_out_the_garage

¹⁵ DSCA. (n.d.). Excess Defense Articles (EDA). Retrieved from <https://www.dsca.mil/programs/excess-defense-articles-eda>

berkontribusi terhadap pencapaian target MEF tahap II yang telah dicapai per 2019 sebesar 63,19%.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memilih untuk menggunakan rumusan masalah: **“Bagaimana dampak kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat terhadap pencapaian target MEF (Minimum Essential Force) Indonesia tahap II tahun 2015-2019?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan dengan tujuan dalam memenuhi gelar S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus dilakukan untuk lebih mengetahui bagaimana kerja sama antara negara Indonesia dengan AS dari tahun 2015 hingga 2019 dapat menghasilkan pengadaan alutsista yang dibutuhkan oleh militer Indonesia dalam memenuhi target standar MEF tahap II yang merupakan bagian dari kebijakan Kemhan RI.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Neorealisme

Asumsi utama yang diperdebatkan dalam teori neorealisme awalnya bermula dari sebuah asumsi bahwa aktor utama politik dunia di dalam sistem internasional yang anarkis ini adalah negara-negara besar. Dalam hubungan internasional anarki memiliki arti sendiri yang artinya adalah; di atas sebuah negara tidak ada otoritas yang terpusat atau arbiter teratas. Terjaminnya keamanan nasional tentu menjadi salah satu hal terpenting yang harus dipastikan

oleh suatu negara agar dapat bertahan hidup menghadapi kekuatan asing di dalam sistem internasional yang anarkis.

Oleh karena itu teori politik internasional yang dapat mengartikan hal tersebut di antaranya adalah neorealisme, yang mana menjadi motivasi utama suatu negara dalam menekankan keamanan.¹⁶ *Structural realism* atau biasa disebut dengan neorealisme merupakan teori dalam hubungan internasional yang dicetuskan pertama kali oleh Kenneth Waltz. Turun dari pemikiran realis klasik, neorealisme menjelaskan tentang bagaimana negara menyikapi kekuatan mereka terhadap keamanan yang merupakan tujuan utama suatu negara yang harus dipenuhi sebelum memenuhi agenda-agenda lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Waltz:

*“In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can states seek such other goals as tranquility, profit, and power.”*¹⁷

Dalam kacamata neorealisme, kekuatan terbagi menjadi dua yakni *defensive realism* dan *offensive realism*. Kedua jenis kekuatan dalam neorealisme tersebut menyikapi kekuatan dengan cara yang berbeda, di mana *defensive realism* dari Kenneth Waltz beranggapan bahwa peningkatan kekuatan yang berlebihan hingga menjadi hegemon bukanlah hal yang perlu dilakukan oleh suatu negara.¹⁸ Namun di sisi lain, *offensive realism* dari John J. Mearsheimer yang pertama kali mendebat teori neorealisme Waltz, beranggapan bahwa negara akan menuntun kekuatan negaranya ke arah yang lebih maksimal, dengan menjadikan “negara hegemon” sebagai tujuan utama setiap negara di dunia.¹⁹ Alhasil, negara cenderung menjadi *power maximizer*, dengan mengorientasikan negaranya untuk menjadi lebih agresif atau

¹⁶ David A. Baldwin. (1997). The concept of security. *Review of international studies*, 23(1), 5-26., p. 21.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Budhi T. Suryanti. (2021). Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(1), p. 31.

¹⁹ Peter Toft. (2005). John J. Mearsheimer: an offensive realist between geopolitics and power. *Journal of International Relations and Development*, 8(4), 381-408., p. 384.

ekspansionis di dalam sistem internasional yang anarki ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mearsheimer:

*“Hegemony means domination of the system, which is usually interpreted as the entire world...[but] it is possible to apply the concept of a system more narrowly and use it to describe particular regions, such as Europe, North-East Asia and the Western Hemisphere.”*²⁰

Namun kembali lagi ke perspektif awal neorealisme menurut Kenneth Waltz, yang dapat disebut dengan *defensive realism*. Kesimpulan yang diambil oleh Waltz adalah bahwa negara-negara di dunia adalah *security maximizers* dan bukanlah *power maximizers*.²¹ Menurut *balance of power* merupakan kunci dalam membentuk dan menjaga keamanan yang maksimal, tanpa harus mengejar kekuatan hegemoni. Selanjutnya setelah tercapai atau terpenuhinya standar kekuatan ideal yang diinginkan dan cukup untuk memastikan keamanan nasional, negara tidak akan melampaui standar tersebut untuk mengejar kekuatan yang lebih besar.²² Secara garis besar, tujuan utama suatu negara adalah untuk mempertahankan kekuasaan negaranya, bukan untuk meningkatkannya.²³

1.4.2 Revolution in Military Affairs (RMA)

Revolution in Military Affairs, atau biasa disebut dengan “RMA” menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang diinisiasikan oleh suatu negara ke dalam organisasi militer atau pertahanannya. Perubahan-perubahan dalam bidang pertahanan ini meliputi perubahan terhadap elemen-elemen dasar kekuatan suatu militer, seperti teknologi, doktrin, organisasi, strategi dan lain-lainnya. Hal-hal tersebut tentunya akan menentukan perkembangan terhadap

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sverrir Steinsson. (2014). John Mearsheimer’s theory of offensive realism and the rise of China. *E-International Relations*, 6., p. 2.

²² *Ibid.*

²³ John J. Mearsheimer. (2001). *The tragedy of great power politics*. WW Norton., p. 21.

postur pertahanan suatu negara ke arah yang lebih modern atau lebih maju, daripada postur pertahanan sebelumnya.

Munculnya istilah *Revolution in Military Affairs* (RMA) dan *Military-Technical Revolution* (MTR) pertama kali dimunculkan oleh studi militer Uni Soviet, pada saat pasca-Perang Dunia II.²⁴ Dan pada masa berjalannya Perang Dingin tepatnya di tahun 1970-an, ilmuwan-ilmuwan militer Soviet mengungkapkan bahwa terdapat kemunculan dalam penggunaan peralatan-peralatan pertahanan dengan teknologi canggih yang merupakan bagian dari MTR, seperti persenjataan presisi serta sistem komunikasi yang lebih maju. Hal tersebut muncul atas dasar kesadaran ilmuwan-ilmuwan Soviet setelah melihat militer AS beserta NATO (North Atlantic Treaty Organization) yang telah memperkenalkan doktrin-doktrin militer baru, yakni *AirLand Battle* (ALB) *concept* dan, *the Follow On Force Attack* (FOFA).²⁵

Namun menurut banyak peneliti terutama dari sisi barat, melihat bahwa pembahasan MTR hanya berpusat pada teknologi, yang mana di sisi lain RMA memiliki pembahasan yang lebih komprehensif terkait perubahan-perubahan dalam badan suatu militer. Hal tersebut dikemukakan oleh Andrew Marshall dan Andrew Krepinevich, yang mana mereka memprakarsai titik balik dari perdebatan RMA pada tahun 1992, dengan menerbitkan *The Military Revolution* yang diterbitkan oleh *Office of Net Assessment* (ONA) dari Pentagon.²⁶

Munculnya titik balik perdebatan RMA tersebut dipicu oleh keberhasilan militer AS dalam memenangkan Perang Teluk di Iraq pada tahun 1991 (Operation Desert Storm). Keberhasilan militer AS tersebut bukan semata-mata hanya karena dukungan dari berbagai negara saja, melainkan dengan kelebihan yang dimilikinya yakni berupa teknologi militer yang jauh lebih maju daripada milik musuh yang dihadapinya. Penggunaan teknologi militer seperti

²⁴ Carlos Alberto Cuoco. (2010). *The revolution in military affairs: Theoretical utility and historical evidence*. Athens, Greece: Research Institute for European and American Studies., p. 12.

²⁵ *Ibid.*, p. 13.

²⁶ *Ibid.*, p. 14.

PGM (Precision-Guided Munitions), pesawat siluman, dan teknologi sensor dalam militer yang telah diperlihatkan oleh militer AS dalam Perang Teluk, menarik perhatian banyak ilmuwan atau peneliti.²⁷

Menurut Krepinevich, RMA atau istilah yang lebih ia gunakan, yakni MR (Military Revolution), merupakan suatu hal di mana sebuah teknologi baru diterapkan ke dalam sistem-sistem militer, yang mana kemudian digabungkan dengan konsep operasional yang inovatif serta pengadaptasian organisasi secara mendasar. Proses tersebut tentunya akan mengubah sifat dan perilaku konflik ke arah yang lebih asimetris. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan efektivitas atau kemampuan potensi tempur angkatan bersenjata suatu negara. Krepinevich memberikan pengertian bahwa kemajuan teknologi memang bagian pendukung terpenting dari revolusi militer, namun bukan satu-satunya yang membentuk revolusi tersebut.²⁸

Menurutnya, setidaknya terdapat empat faktor yang diketahui memiliki peran dalam revolusi tersebut, yakni: perubahan teknologi, pengembangan sistem, inovasi operasional, dan adaptasi organisasi. Selanjutnya ia juga memberikan tambahan, bahwa terdapat dua elemen terpenting lainnya untuk kemunculan MR menurutnya, yakni tingkat persaingan negara dalam sistem internasional dan strategi yang dipilih oleh para pesaing untuk mengejar dalam memanfaatkan potensi revolusi militer yang muncul.²⁹ Dengan hal tersebut, seperti yang disimpulkan oleh Richard O. Hundley, banyak peneliti, termasuk Krepinevich melihat bahwa RMA sebagai gabungan antara kemajuan teknologi C3I (Command, Control, Communications,

²⁷ *Ibid.*, p. 8.

²⁸ *Ibid.*, p. 17.

²⁹ *Ibid.*

and Intelligence) dan PGM, digabungkan dengan konsep operasional baru, yang ditujukan agar dapat beradaptasi dengan peperangan modern.³⁰

Akan tetapi dalam menjalankan proses revolusi tersebut, suatu negara tentunya memiliki strategi tersendiri dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, yang mana dalam hal ini mengimplementasikan RMA ke dalam organisasi pertahanannya. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk memastikan kesuksesan revolusi tersebut, adalah dengan melakukan kerja sama dengan negara lain.

Melihat banyaknya inovasi dalam bidang pertahanan, RMA memiliki peran yang besar dalam membentuk wajah baru pertempuran yang baru, yang mana akan harus dihadapi dengan teknologi-teknologi modern dalam sistem militernya, contoh seperti teknologi informasi, sensor, pesawat nirawak (UAV), satelit, dan teknologi serangan jarak jauh. Apabila suatu negara yang menginginkan contoh teknologi-teknologi tersebut untuk dapat diadaptasikan ke dalam sektor pertahanannya, tentu dapat dilakukan baik dengan membangunnya dari dalam negeri maupun luar negeri.³¹

Untuk negara yang belum memiliki kemampuan dalam memproduksi teknologi-teknologi tersebut secara mandiri, akuisisi atau pengadaan peralatan-peralatan pertahanan dapat didapat dari kerja sama dengan negara lain yang mana industri pertahanannya memiliki kemampuan untuk merealisasikan hal tersebut. Mengingat industri pertahanan yang maju di suatu negara, juga berambisi dalam menjadi pemasok peralatan pertahanan untuk klien atau pembeli yang tidak hanya dari satu negara saja.³²

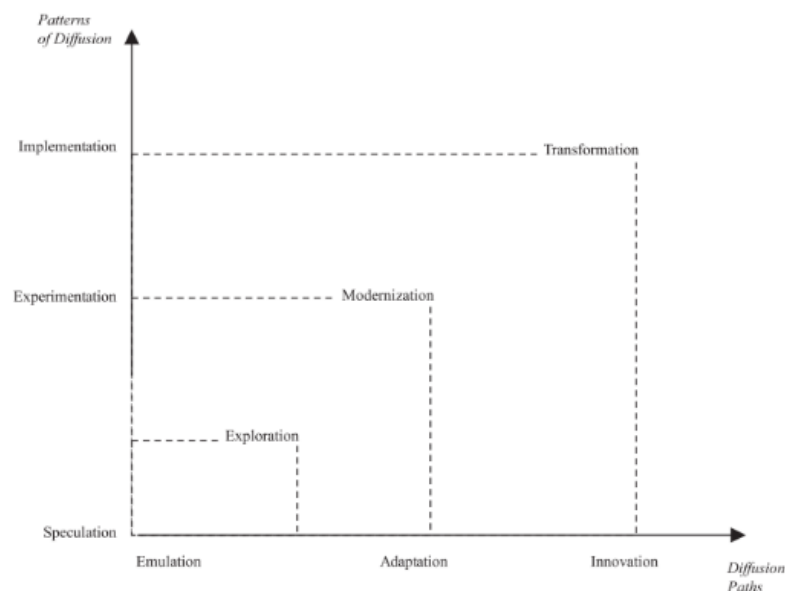
³⁰ Richard O. Hundley. (1999). *Past Revolutions, Future Transformations. What Can the History of Revolutions in Military Affairs Tell us about Transforming the US Military?*. RAND Corp. Santa Monica, CA., p. 8.

³¹ Robbin E. Laird & Holger H. Mey. (1999). *The revolution in military affairs: allied perspectives (Vol. 60)*. DIANE Publishing., p. 9.

³² *Ibid.*

Menurut Michael Raska, RMA sudah dapat dikatakan memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan arah peningkatan atau proses modernisasi kemampuan pertahanan suatu negara, yang didapat dengan melakukan akuisisi teknologi pertahanan baik didapat dari dalam negeri maupun melalui impor dari luar negeri.³³ Selain itu, Raska menambahkan bahwa modernisasi juga melibatkan pengadopsian doktrin baru, penyusunan organisasi dengan struktur yang baru, serta pelembagaan tenaga manusia dengan manajemen baru dan pelatihan tempur baru.³⁴

Gambar 1.1 Lintasan Perjalanan RMA Suatu Negara Menurut Michael Raska



Sumber: Raska (2011)

Perjalanan suatu negara dalam menjalankan RMA-nya, tentu memerlukan proses yang panjang di mana harus melalui berbagai tahap. Michael Raska menjelaskan tiga lintasan difusi implementasi RMA dalam jurnalnya (2011), yang mana terdiri dari tiga tahap, yakni: 1. *Paths*-emulasi, adaptasi, & inovasi; 2. *Patterns*-spekulasi, eksperimen, & implementasi; 3.

³³ Michael Raska. (2011). RMA diffusion paths and patterns in South Korea's military modernization. *The Korean Journal of Defense Analysis*, 23(3), 369-385., p. 371.

³⁴ *Ibid.*

Magnitude-eksplorasi, modernisasi, & transformasi. Tiga lintasan difusi tersebut menggambarkan perjalanan terkait penerapan atau pengimplementasian RMA terhadap postur pertahanan suatu negara.³⁵

Pada tahap yang pertama, terlihat bahwa *patterns* atau pola awal menunjukkan *speculation*, atau spekulasi yang mana dipicu oleh adanya potensi ancaman terhadap keamanan negara. *Paths*, atau jalan yang akan ditempuh suatu negara untuk menghadapi ancaman keamanan tersebut adalah dengan melakukan *emulation*, atau meniru negara lain dalam hal pertahanan. Dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa tahap ini merupakan tahapan *exploration*, atau eksplorasi.³⁶

Selanjutnya tahap kedua yakni *modernization* atau modernisasi, setelah berangkat dari pola spekulasi, pola selanjutnya akan mengarah pada *experimentation* atau eksperimen. Hal tersebut di mana petinggi dari organisasi pertahanan suatu negara akan mulai melakukan eksperimen dengan melakukan *adaptation* atau adaptasi, sebagai jalan yang ditempuh terhadap konsep operasional yang menyangkut pada modernisasi terhadap unsur-unsur yang tergabung dalam RMA seperti struktur-struktur, taktik dalam pertempuran, sistem persenjataan, dan teknologi yang baru.³⁷

Dan selanjutnya yang terakhir, yakni tahap ketiga berupa tahap *transformation*, atau transformasi. Tahapan tersebut memperlihatkan wujud akhir upaya implementasi RMA terhadap organisasi pertahanan suatu negara, di mana terjadinya perubahan yang besar yang disebabkan oleh pola *innovation* atau inovasi, dengan adanya perubahan terhadap hal-hal fundamental dalam RMA seperti strategi, doktrin, organisasi, dan teknologi. Dengan adanya

³⁵ *Ibid.*, 371-372.

³⁶ Handaka, et al. (2021). Decision-Making Strategy in Developing the Revolution in Military Affairs (RMA) Index in Indonesia to Support National Defense. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal NVEO*, 6081-6096., p. 6086.

³⁷ *Ibid.*

hal-hal tersebut, *implementation* atau implementasi terhadap hasil dari modernisasi berubah menjadi transformasi dapat dikatakan berhasil, dengan ditandai indikator-indikator transformasi, seperti: revisi doktrin untuk mengakomodasi cara perang yang baru, penguatan sumber daya pendukung, transformasi strategis, unit militer inovatif dengan peta kekuatan baru, pelatihan baru di lapangan, serta penggunaan sistem persenjataan yang lebih modern.³⁸

Melihat perjalanan implementasi RMA terhadap pertahanan suatu negara di atas, tentu tidak dapat melupakan adanya faktor pendorong yang mendorong akan perubahan-perubahan tersebut. Menurut Emily O. Goldman, terdapat empat faktor pendorong terjadinya RMA, yakni keamanan, ekonomi politik, teknologi, dan institusional.³⁹

Berikut penjelasan Goldman terkait masing-masing faktor, seperti; keamanan, di mana negara akan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanannya demi menciptakan keamanan negara yang kuat, yang mana terkadang harus dilakukan dengan meniru RMA negara lain, bahkan dari negara yang sangat jauh; ekonomi politik, dengan sektor non-pemerintahan seperti sektor swasta yang berkemampuan memberikan kontribusi terkait RMA terhadap militer suatu negara melalui kontrak yang disetujui. Hal tersebut karena sektor swasta juga menginginkan peran yang kuat di perekonomian global; teknologi juga mendorong militer suatu negara untuk mengadopsi teknologi yang lebih canggih, di mana sebagian besar berasal dari sektor sipil atau swasta, mengingat semakin modernnya konsep peperangan; dan institusional, sebagai salah satu faktor pendorong yang memperlihatkan bahwa inisiasi RMA terhadap militer suatu negara tidak akan lepas dari pengaruh politik, di mana pemerintah lah yang bertanggung jawab dalam memberi keputusan, dengan melihat sisi keuntungan dari dilakukannya RMA walaupun ancaman terhadap negara telah terlihat jelas.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

1.4.3 Military-Industrial Complex (MIC)

Dalam konsep ini, *Military-Industrial Complex* (MIC) berdasar pada hubungan atau relasi informal antara sebuah pemerintah serta militernya, dengan perusahaan-perusahaan industri pertahanan. Istilah MIC pertama kali dicetuskan oleh presiden AS yang ke-34, yakni Presiden Dwight D. Eisenhower, yang mana ia menjelaskan konsep tersebut dalam pidato perpisahannya sebagai presiden pada tahun 1961:

*“[The] conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience...[W]e must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.”*⁴¹

Melalui pesan dari pidato tersebut, ia selamanya mengingatkan akan timbulnya ancaman dari industri-industri pertahanan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perwira-perwira tertinggi dalam angkatan bersenjata yang haus akan peperangan.⁴² Di dalam lingkup pemerintahan AS, istilah dari konsep MIC ini sering kali disebut dengan “MICC” atau *Military-Industrial-Congressional Complex*, dengan melibatkan kongres.⁴³ Hal tersebut karena kongres, atau cabang dari pemerintahan seperti legislatif yang juga bertanggung jawab dalam menyetujui perjanjian-perjanjian, ikut menjembatani hubungan antara militer dengan industri militer.

⁴¹ Charles J. Dunlap Jr. (2011). The military-industrial complex. *Daedalus*, 140(3), 135-147., p. 135.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Samson Akpati Nzeribe & Mukhtar Imam. (2018). Military Industrial Complex: A catalyst for conflicts and wars. *NG-Journal of Social Development*. 7. 10.12816/0046772., p. 74.

Konsep hubungan yang tergabung dalam MIC biasa disebut dengan “iron triangle” dalam dunia perpolitikan AS, dengan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dalam memberikan kontribusi politik, persetujuan politik terkait pengeluaran militer, lobi guna mempermudah birokrasi, dan pengawasan dalam bidang industri. Secara luas, hubungan tersebut juga meliputi jaringan kontrak dan aliran uang beserta dengan sumber daya yang ditengahi oleh individu atau aktor yang berperan dalam MIC, seperti: perusahaan dan lembaga kontraktor pertahanan, kontraktor militer swasta, Pentagon (kantor pusat pertahanan AS), Kongres AS, dan cabang Eksekutif AS.⁴⁴

MIC seringkali disinggung pada saat sektor pertahanan di suatu negara yang dilihat berharga dan penting bagi perekonomian suatu negara tersebut, tengah diamati.⁴⁵ Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa eratnya hubungan antara industri pertahanan dengan suatu pemerintah sangatlah berhubungan dengan adanya MIC ini. Secara garis besar, banyak ilmuwan sosial yang melihat MIC sebagai suatu hubungan koalisi kepentingan yang berisikan industri pertahanan dengan kepentingan pribadi di dalam pemerintahan suatu negara. Kombinasi koalisi kepentingan tersebut memiliki pengaruh yang dapat mengarahkan suatu negara untuk mengambil keputusan guna kepentingan koalisi tersebut, yang mana belum tentu dilakukan demi keamanan nasional negaranya.⁴⁶

Dalam pasar global, MIC memiliki peran yang besar dalam aktivitas penjualan persenjataan. Perusahaan-perusahaan pertahanan besar seperti Lockheed-Martin, BAE Systems, Boeing, dan lain-lain, yang mana mampu menyediakan peralatan pertahanan untuk suatu negara yang berminat menjadi pembeli dengan menyetujui kontrak pengadaan, tentu berkontribusi dalam bisnis penjualan persenjataan di pasar global. Hal tersebut dapat dilakukan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ J. Paul Dunne & Elizabeth Skons. (2010). *The Military Industrial Complex. The Global Arms Trade: A Handbook. London: Routledge London, 281-292., p. 2.*

⁴⁶ *Ibid.*

karena perusahaan-perusahaan pertahanan tidak terikat kepada suatu negara, yang berarti tidak diatur dan dapat melampaui negara.⁴⁷

Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, teknologi dalam bidang pertahanan juga menjadi suatu hal terpenting yang selalu mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi pertahanan juga berperan dalam memperlihatkan wajah baru dalam peperangan modern.

Hal tersebut tentunya seperti yang diketahui dipicu oleh adanya RMA, dengan mendatangkan berbagai jenis peralatan-peralatan pertahanan modern yang berdampak pada modernisasi pertahanan suatu negara seperti teknologi informasi, komunikasi, persenjataan presisi (PGM), dan lain sebagainya, yang mana sangat penting untuk sebuah operasi militer. Munculnya teknologi-teknologi pertahanan modern tersebut, tentu mengubah sifat permintaan pasar persenjataan, serta memicu banyak permintaan dari negara-negara yang membutuhkan teknologi-teknologi pertahanan modern yang terkandung dalam RMA.⁴⁸

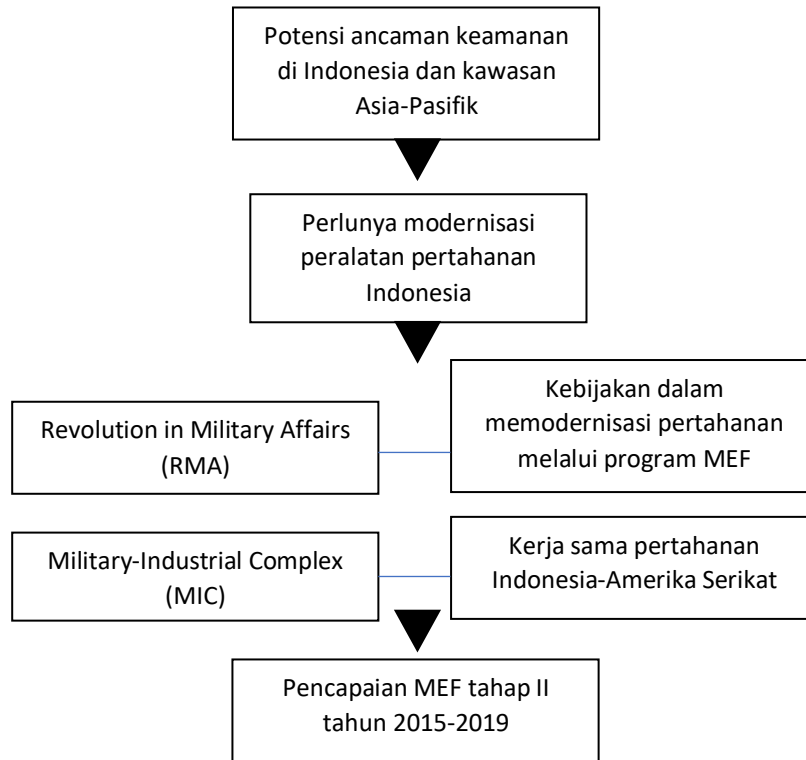
Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa RMA juga memiliki peran dalam mendorong adanya MIC. Dengan kontraktor-kontraktor dari sektor pertahanan swasta yang memiliki kemampuan dalam memproduksi dan memasarkan peralatan-peralatan pertahanannya yang berteknologi lebih maju, tentu akan menjadi incaran banyak negara di dunia yang ingin mengadakan kontrak pembelian, terutama tentunya dari negara-negara yang belum memiliki kemampuan untuk memproduksinya dari dalam negeri. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh kontraktor-kontraktor pertahanan swasta tersebut dapat meningkat menjadi berlipat ganda apabila negara yang sedang diunggulkannya berada pada masa perang, dan sangat membutuhkan persenjataan yang lebih modern.

⁴⁷ Sanya Ojo. (2021). *Global Perspectives on Military Entrepreneurship and Innovation*. Nigeria: IGI Global., p. 22.

⁴⁸ J. Paul Dunne & Elizabeth Skons, *Op. Cit*, p. 13.

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Berawal dari potensi ancaman-ancaman keamanan di kawasan Asia-Pasifik terutama di Asia Tenggara, pemerintah Indonesia mulai berinisiatif dalam menjadi *security maximizer* seperti yang dijelaskan dalam neorealisme, dengan memodernisasi angkatan bersenjata mulai dari organisasi hingga peralatan-peralatan pertahanannya yang mana merupakan aspek terpenting dalam program MEF yang telah dicetuskan oleh Kemhan RI.

RMA memiliki peranan penting dalam melakukan perubahan-perubahan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Andrew Krepinevich bahwa perkembangan teknologi dalam militer memang merupakan bagian dari revolusi militer suatu negara namun bukanlah satu-satunya aspek dalam proses merevolusi militer. Michael Raska juga menjelaskan

perjalanan pertahanan suatu negara dalam memodernisasi militernya melalui tiga lintasan difusi dalam RMA.

Terkait memenuhi pencapaian alutsista melalui program MEF-nya, Indonesia memperoleh atau mengakuisisi peralatan-peralatan militernya melalui pendekatan kerja sama pertahanan dengan berbagai negara. Salah satunya ialah Amerika Serikat, yang bersedia untuk menerima Indonesia sebagai mitra. Dari sinilah MIC mulai memainkan perannya, dengan Kemhan RI menggandeng pemerintah serta industri-industri pertahanan AS sebagai pemasok yang mampu dan berpengalaman dalam memproduksi peralatan-peralatan pertahanan berteknologi lebih maju. Hal tersebut tentu berkontribusi dalam meningkatkan pencapaian target MEF tahap II tahun 2015-2019.

1.6 Argumen Utama

Penelitian ini memberikan argumen utama, yang berisi bahwa adanya potensi ancaman ketidakstabilan kawasan Asia-Pasifik serta kurangnya kesiapan alutsista Indonesia dalam menghadapi hal tersebut, memotivasi Indonesia untuk merevolusi postur pertahanannya, dengan menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara di dunia, salah satunya yakni AS. Kerja sama pertahanan antara pemerintah RI-AS sangat berkontribusi terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menjalankan kepentingan nasionalnya yang salah satunya dengan mengimplementasikan pemenuhan alutsista standar MEF menggunakan strategi elemen pembangunan berupa pengadaan. Kontribusi AS terhadap target standar MEF Indonesia dalam kerja sama pertahanan tersebut berupa penawaran pengadaan peralatan-peralatan pertahanan yang dijalankan melalui berbagai macam program seperti FMS dan EDA, yang hasilnya diperoleh Indonesia. Kontribusi dari kerja sama tersebut berdampak pada peningkatan modernisasi dan pengadaan alutsista sepanjang pencapaian program MEF tahap II tahun 2015-2019.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif dilakukan guna mencari alasan sebab-akibat terkait mengapa terjadinya suatu fenomena. Metode ini memberikan peneliti gambaran umum terhadap suatu fenomena, yang kemudian diuji menggunakan teori atau konsep tertentu.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, linimasa yang digunakan bermula dari tahun pertama berjalannya MEF tahap II, yaitu tahun 2015 hingga berakhir di tahun 2019. Sepanjang empat tahun tersebut, kerja sama Indonesia-AS telah berkontribusi dalam upaya pencapaian standar MEF tahap II Indonesia.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur. Studi literatur menelusuri data atau sumber tertulis yang sudah pernah dibuat sebelumnya, yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.⁴⁹ Jenis berbagai sumber atau data yang didapat oleh penulis adalah sekunder. Data-data yang diambil berasal dari karya penelitian yang sudah ada dan diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sumber dari penelitian yang penulis teliti seluruhnya didapat dari literatur, berita, artikel, dan karya ilmiah.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Dalam penelitian ini, penulis mengolah data yang diambil dari literatur, yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bentuk penyajian

⁴⁹ Penerbit Deepublish. (2021). Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya. Retrieved from <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>

data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang trajektori atau sejarah kerja sama pertahanan antara Indonesia-AS, postur pertahanan Indonesia pra-MEF, serta agenda dan pencapaian MEF di setiap tahapannya.

BAB III dengan menjelaskan tentang analisis pemenuhan pertahanan sepanjang MEF tahap II Indonesia melalui strategi elemen pembangunan, pengadaan yang dianalisis melalui teori atau konsep dari neorealisme, RMA, dan MIC. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait dampak pertahanan Indonesia dari kerja sama Indonesia-AS.

BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran.